

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di suatu negara, yang menyebabkan pendapatan per kapita meningkat sehingga tercapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Pelaksanaan pembangunan ekonomi pada negara berkembang, khususnya Indonesia tidak terlepas dari adanya masalah terkait dengan pembangunan, salah satunya yaitu permasalahan mengenai ketimpangan pendapatan.² Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan antar individu tidak merata.³ Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan banyak faktor pendukung, salah satunya yaitu pemerataan pendapatan masyarakat sehingga tidak menimbulkan ketimpangan. Hal ini dikarenakan pemerataan pendapatan merupakan salah satu persyaratan yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan.⁴

Untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan penduduk suatu negara atau daerah dapat menggunakan indeks Gini. Nilai indeks Gini berkisar

² Ratiarum Fatika Yoertiara dan Nur Feriyanto, 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa', *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 1.1 (2022), 92–100 <<https://doi.org/10.20885/jkek.voll.iss1.art9>>.

³ Aufa Nadya dan Syafri Syafri, 'Analisis Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia', *Media Ekonomi*, 27.1 (2019), 37–52 <<https://doi.org/10.25105/me.v27i1.5300>>.

⁴ Fradya Randa, 'Dampak Pertumbuhan Ekonomi Dan Ipm Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau', *Jurnal Al-Intifaq*, 2.2 (2022), 1–7.

antara 0 hingga 1. Nilai indeks Gini mendekati 1 menunjukkan suatu daerah memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi, sedangkan nilai indeks Gini mendekati 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan. Indeks Gini memberikan informasi yang signifikan mengenai ketidakmerataan pendapatan atau ekonomi di suatu negara atau daerah.⁵ Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023 nilai indeks gini nasional sebesar 0,388. Empat besar provinsi di Indonesia dengan nilai indeks Gini di atas nasional pada tahun 2023, urutan pertama adalah Provinsi D.I Yogyakarta sebesar 0,449, kemudian disusul Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,431, Provinsi Gorontalo sebesar 0,417, dan yang terakhir Provinsi Jawa Barat sebesar 0,425.

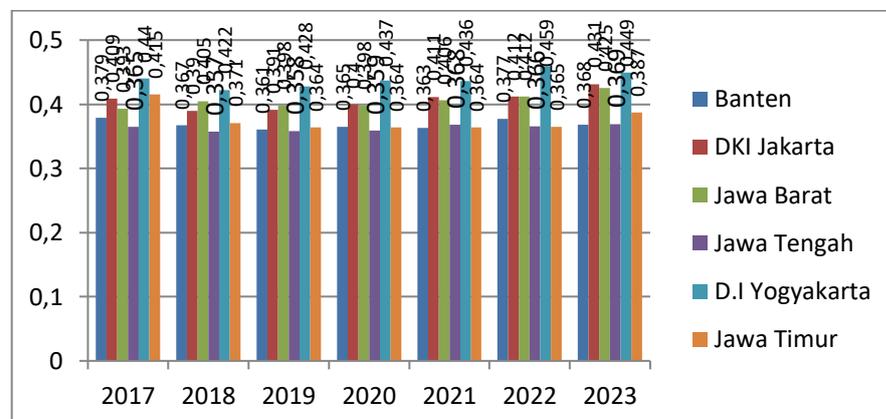
Diantara 4 provinsi dengan nilai indeks gini di atas nasional tersebut, terdapat 3 provinsi yang berasal dari Pulau Jawa yaitu Provinsi D.I Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat. Sehingga ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2023 ini didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa, sehingga perlu adanya perhatian khusus terhadap permasalahan tersebut. Pulau Jawa sendiri menjadi pusat perekonomian Indonesia dengan kontribusi terbesar terhadap PDB Nasional yang mana dikenal sebagai pusat ekonomi dan industri, keberadaan industri di Pulau Jawa ini sangat beragam. Meskipun demikian, masih mengalami ketidakmerataan distribusi pendapatan di antara wilayahnya. Beberapa daerah lebih diuntungkan daripada daerah yang lain, sehingga tercipta ketimpangan pendapatan. Penggunaan indeks Gini ini dapat membantu

⁵ Laras Sintya Noorachmadan dan Suliadi, 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Pulau Kalimantan Tahun 2022', *Bandung Conference Series: Statistics*, 4.1 (2024), 125–34 <<https://doi.org/10.29313/bcss.v4i1.10784>>.

pemerintah untuk memantau serta mengevaluasi tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah di Pulau Jawa.

Berikut ini merupakan data ketimpangan pendapatan atau indeks Gini pada provinsi di pulau Jawa Tahun 2017-2023:

Grafik 1.1
Indeks Gini pada provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2017-2023



Sumber: Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa tingkat ketimpangan pendapatan pada provinsi di Pulau Jawa dari tahun ke tahun yaitu periode 2017-2023 mengalami fluktuasi. Dapat dilihat bahwasannya DKI Jakarta dan D.I Yogyakarta merupakan provinsi yang memiliki nilai indeks Gini atau tingkat ketimpangan pendapatannya masih cenderung tinggi daripada provinsi lainnya. Sedangkan Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki nilai indeks Gini yang lebih rendah dan cenderung stabil.

Nilai indeks gini Provinsi Banten tertinggi yaitu pada tahun 2017 sebesar 0,37% dan terendah pada tahun 2019 sebesar 0,36%. Selanjutnya, Provinsi DKI Jakarta tertinggi yaitu pada tahun 2023 sebesar 0,41% dan

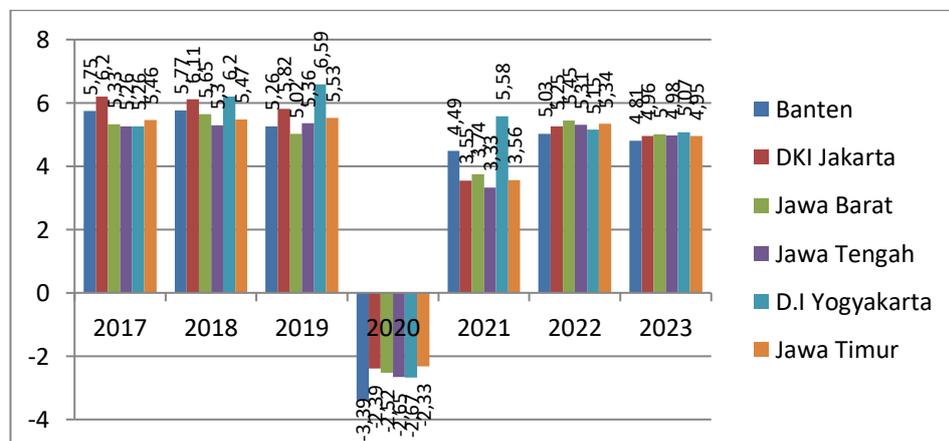
terendah pada tahun 2018 sebesar 0,39%. Kemudian Provinsi Jawa Barat tertinggi pada tahun 2023 sebesar 0,42% dan terendah pada tahun 2017 sebesar 0,39%. Selanjutnya Provinsi Jawa Tengah tertinggi pada tahun 2023 sebesar 0,37% dan terendah pada tahun 2018 sebesar 0,35%. Kemudian pada Provinsi D.I Yogyakarta nilai indeks gini tertinggi yaitu pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,45% dan terendah tahun 2018 sebesar 0,42%. Terakhir, Provinsi Jawa Timur dengan indeks Gini tertinggi pada tahun 2017 sebesar 0,41% dan terendah berturut-turut yaitu pada tahun 2019-2021 sebesar 0,36%.

Provinsi atau daerah dengan tingkat ketimpangan yang tinggi perlu diperhatikan lebih khusus dan penyebab dari ketimpangan di provinsi atau daerah tersebut harus diatasi dengan seksama, karena dengan penurunan tingkat ketimpangan pendapatan si kaya dan si miskin di provinsi-provinsi tersebut maka diharapkan dapat menurunkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu daerah maupun di tingkat nasional. Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, dan Jawa Timur merupakan wilayah-wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang beragam, tetapi juga menghadapi tantangan ketimpangan pendapatan yang signifikan. Faktor pertama yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa yaitu adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi antar provinsi di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan implikasi aktivitas perekonomian terhadap bertambahnya pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.

Perekonomian dikatakan tumbuh ketika pendapatan riil pada tahun sebelumnya jauh lebih kecil dibandingkan balas jasa riil pada tahun tertentu. Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang positif. Artinya ketika perekonomian mengalami peningkatan maka ketimpangan pendapatan juga akan mengikuti peningkatan perekonomian tersebut. Semakin tinggi peningkatan perekonomian semakin tinggi pula ketimpangan pendapatan masyarakat.⁶ Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan merupakan dua tujuan pembangunan ekonomi yang seharusnya dicapai secara bersamaan.⁷ Berikut ini merupakan data pertumbuhan ekonomi pada provinsi di Pulau Jawa:

Grafik 1.2
PDRB atas Harga Konstan pada provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2017-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

⁶ Emi Nuraini, 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Disparitas Pendapatan Di Wilayah Gerbangkertosusila', *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 5.1 (2017), 52 <<https://doi.org/10.26740/jepk.v5n1.p52-67>>.

⁷ Razi Rahman dan Dewi Zaini Putri, 'Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi Di Pulau Sumatera', *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 3.3 (2021), 37 <<https://doi.org/10.24036/jkep.v3i3.12368>>.

Dari grafik di atas, dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten tertinggi pada tahun 2018 sebesar 5,77 persen dan terendah tahun 2020 yaitu sebesar -3,39 persen. Provinsi DKI Jakarta tertinggi yaitu pada tahun 2018 sebesar 6,11 persen dan terendah tahun 2020 sebesar -2,39 persen. Kemudian Provinsi Jawa Barat tertinggi tahun 2018 sebesar 5,65 persen dan terendah pada tahun 2020 sebesar -2,52 persen. Selanjutnya, Provinsi Jawa Tengah tertinggi pada tahun 2019 sebesar 5,36 persen dan terendah tahun 2020 sebesar -2,65 persen. Kemudian Provinsi D.I Yogyakarta tertinggi pada tahun 2019 sebesar 6,59 persen dan terendah yaitu pada tahun 2020 sebesar -2,67 persen. Terakhir, Provinsi Jawa Timur tertinggi pada tahun 2019 sebesar 5,53 persen dan terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar -2,33 persen.

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi pada provinsi di Pulau Jawa sangat berfluktuatif. Perbedaan pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi di Pulau Jawa ini menggambarkan keadaan ekonomi yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Pada tahun 2020 semua provinsi di pulau Jawa mengalami penurunan yang sangat signifikan akibat dari dampak pandemi covid-19. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah tingkat pengangguran. Pengangguran adalah masalah ekonomi makro yang mempengaruhi individu atau masyarakat secara langsung. Pengangguran memiliki dampak buruk terhadap nilai kesejahteraan individu atau masyarakat itu sendiri. Semakin tinggi tingkat pengangguran maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan yang

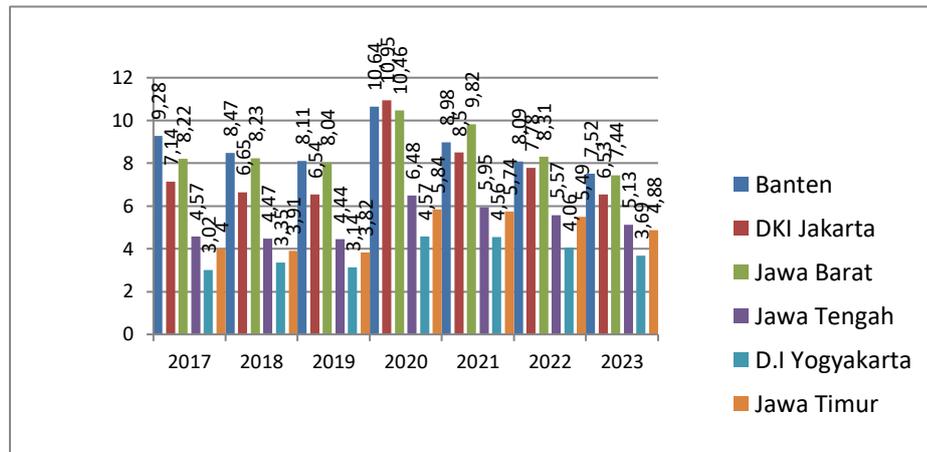
dihadapi suatu daerah. Pengangguran dapat terjadi salah satunya disebabkan oleh banyaknya jumlah penduduk, maka secara tidak langsung akan terjadi penambahan angkatan kerja. Apabila setiap penambahan jumlah angkatan kerja tidak diimbangi dengan perluasan dan kapasitas lapangan kerja yang memadai, maka jumlah angka pengangguran akan terus meningkat setiap tahunnya.⁸

Tingkat pengangguran juga mempunyai peran penting untuk mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi. Peningkatan pengangguran memiliki dampak yang memberatkan pada ketimpangan pendapatan. Oleh sebab itu, dengan mengurangi pengangguran, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi dapat dikurangi.⁹ Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur tingkat pengangguran dapat menggunakan indikator ketenagakerjaan yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berikut ini merupakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada provinsi di Pulau Jawa:

Grafik 1.3
Tingkat Pengangguran Terbuka pada provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2017-2023

⁸ Panca Gunawan Putra dan Ali Anis, 'Analisis Kausalitas Indeks Pembangunan Manusia Pengangguran Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia', *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 4.4 (2022), 57 <<https://doi.org/10.24036/jkep.v4i4.14062>>.

⁹ Kasman Karimi.,dkk, 'Pengaruh Penanaman Modal Asing, Indeks Persepsi Korupsi, Kemiskinan, Pengangguran Dan Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia', *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 13.1 (2023), 107–16 <<https://doi.org/10.37859/jae.v13i1.4775>>.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka antar provinsi di Pulau Jawa berbeda-beda dan berfluktuatif sepanjang periode 2017-2023. Tingkat Pengangguran Terbuka pada Provinsi Banten tertinggi yaitu pada tahun 2020 sebesar 10,64% dan terendah pada tahun 2023 sebesar 7,52%. Provinsi DKI Jakarta tertinggi yaitu pada tahun 2020 sebesar 10,95% dan terendah pada tahun 2023 sebesar 6,53%. Kemudian Provinsi Jawa Barat tertinggi pada tahun 2020 sebesar 10,46% dan terendah pada tahun 2023 sebesar 7,44%. Selanjutnya Provinsi Jawa Tengah tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 6,48% dan terendah pada tahun 2019 sebesar 4,44%. Kemudian Provinsi D.I Yogyakarta tertinggi yaitu pada tahun 2020 sebesar 4,57% dan terendah pada tahun 2017 sebesar 3,02%. Yang terakhir Provinsi Jawa Timur tertinggi pada tahun 2020 sebesar 5,84% dan terendah pada tahun 2019 sebesar 3,82%.

Dari grafik di atas, dapat diketahui pada tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka pada semua provinsi di Pulau Jawa ini meningkat. Hal

ini disebabkan karena terjadinya Covid-19 yang mana mengakibatkan para tenaga kerja di-PHK besar-besaran sehingga tingkat pengangguran meningkat. Tingkat pengangguran yang tinggi akan mempengaruhi tingkat produktivitas suatu daerah, sehingga akan menyebabkan suatu wilayah tidak optimal dan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut tertinggal dengan wilayah lain. Jika dilihat melalui kondisi demografis dari sisi pengangguran di suatu daerah, tingkat pengangguran yang tinggi akan menyebabkan ketimpangan yang tinggi pula.¹⁰

Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) merupakan salah satu instrumen pemerataan distribusi pendapatan. Jika zakat dikelola dengan baik dalam hal penerimaan maupun pendistribusian, maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹¹ ZIS merupakan dana yang berasal dari muzakki dimana dana ini dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan kemudian didistribusikan atau disalurkan kepada mustahik.¹² Fakir, miskin, amil muallaf, hamba sahaya, gharim (orang yang memiliki hutang), fii sabilillah (orang yang berjihad di jalan Allah), dan Ibnu Sabil (orang

¹⁰ Muhammad Ibnu Fatsabit dan Husna Leila Yusran, 'Pengaruh Keterbukaan Ekonomi, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia', *Media Ekonomi*, 27.1 (2019), 71–84 <<https://doi.org/10.25105/me.v27i1.5304>>.

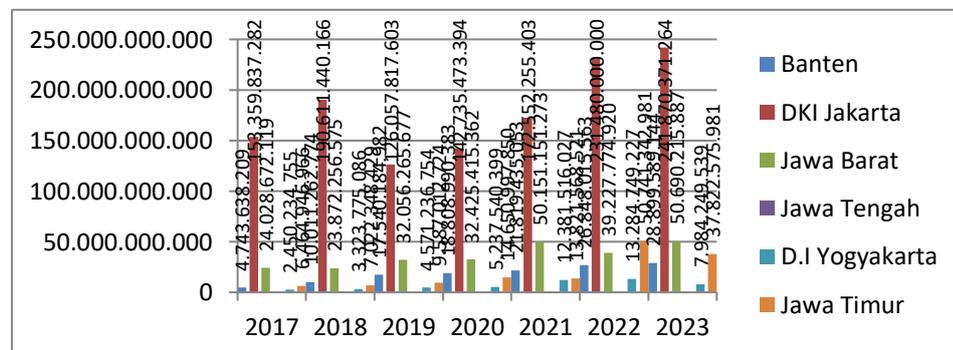
¹¹ Dinda Ratnasari dan Suherman Rosyidi, 'Dampak Kesenjangan Antara Penerimaan Dan Penyaluran Dana Zis Terhadap Rpogram-Program LAZNAS Al-Azhar', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6.3 (2020), 489 <<https://doi.org/10.20473/vol6iss20193pp489-509>>.

¹² Multifiah, *ZIS untuk Kesejahteraan Ummat*, (Malang: UB Press, 2011), hlm. 49

yang sedang melakukan perjalanan) merupakan sekelompok mustahik.¹³

Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia memiliki potensi penyaluran dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) yang sangat besar. Namun di balik besarnya potensi yang dimiliki, penerimaan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) masih memiliki ketimpangan yang cukup jauh, sehingga mempengaruhi ketimpangan pendapatan antar individu pada tiap provinsi.¹⁴ Seperti halnya masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa. Berikut ini merupakan data penyaluran ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) pada provinsi di Pulau Jawa:

Grafik 1.4
Penyaluran Dana ZIS pada provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2017-2023



Sumber: BAZNAS dan LAZ

Berdasarkan grafik di atas, jumlah penyaluran dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) pada provinsi di Pulau Jawa tahun 2017-2023 menunjukkan peningkatan. Meskipun demikian, terdapat fluktuasi berupa penurunan kecil

¹³ Annisa Aulia Machmudah dan Chaidir Iswanaji, 'Analisis Strategi Penyaluran Dana ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika', *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiah*, 6.2 (2021), 1–10. <<https://doi.org/10.70032/wgc57x27>>

¹⁴ Nurfitri Arsita dan Ade Nur Rohim, 'Efektivitas Penyaluran Dana ZIS Pada Sektor Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 4.2 (2023) <<https://doi.org/10.31000/almaal.v4i2.7733>>.

setiap tahunnya. Namun, secara keseluruhan, peningkatan yang terjadi lebih signifikan dibandingkan dengan penurunan pada setiap tahun dalam periode tersebut. Dari grafik di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penyaluran dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) pada Provinsi Banten tahun 2017 sebesar Rp. 4.743.638.209 dan berfluktuatif pada setiap tahunnya hingga pada tahun 2023 jumlah penyaluran dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) mencapai Rp. 28.899.589.144. Kemudian penyaluran dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 sebesar Rp. 153.359.837.282 dan berfluktuatif pada setiap tahunnya hingga pada tahun 2023 jumlah penyaluran dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) mencapai Rp. 241.870.371.264.

Kemudian Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 sebesar Rp. 24.028.672.119 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi Rp. 50.690.215.887. Selanjutnya, Provinsi D.I Yogyakarta penyaluran dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.450.234.755 kemudian sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan dengan perolehan sebesar Rp. 13.284.749.227 dan pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi Rp. 7.984.249.539. Terakhir Provinsi Jawa Timur, yang mana pada tahun 2017 penyaluran dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) sebesar Rp. 6.464.946.966 hingga pada tahun 2022 mencapai 50.741.342.981 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi Rp. 37.822.575.981.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan penyaluran dana ZIS merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, terutama

untuk negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis ketimpangan pendapatan dengan beberapa variabel yang mempengaruhinya dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Penyaluran Dana ZIS Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan atau diidentifikasi mengenai beberapa persoalan atau permasalahan dalam penelitian ini. Adapun beberapa permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Ketimpangan Pendapatan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Gini pada provinsi di Pulau Jawa tahun 2017-2023 mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Artinya kondisi ini memperlihatkan bahwa ketimpangan pendapatan pada provinsi di Pulau Jawa ini masih menjadi masalah yang serius.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi pada provinsi di Pulau Jawa tahun 2017-2023 mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada setiap provinsi di Pulau Jawa ini belum tentu diiringi dengan pemerataan pendapatan. Meskipun secara umum pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah meningkat, namun hal ini seringkali tidak dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti harus melakukan analisis tentang seberapa besar pertumbuhan ekonomi dapat berkontribusi terhadap pengurangan ketimpangan

pendapatan.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada provinsi di Pulau Jawa tahun 2017-2023 mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi ketidakseimbangan antara penawaran tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia.

4. Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat penyaluran dana ZIS pada provinsi di Pulau Jawa tahun 2017-2023 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ZIS memiliki potensi sebagai instrumen distribusi atau pemerataan pendapatan yang dapat mengurangi ketimpangan pendapatan pada masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa?
2. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa?
3. Apakah penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan

penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa?
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa?
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa?
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa?

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang optimal baik secara teoritis maupun praktis kepada semua pihak yang membutuhkan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur, memberikan wawasan baru terkait isu atau permasalahan yang dibahas, dan menambah informasi dan pengetahuan khususnya tentang ilmu ekonomi makro dan ekonomi pembangunan, sehingga dapat digunakan

sebagai acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau bahan evaluasi terkait program-program pemerintah yang telah berjalan guna untuk menyusun kebijakan baru yang lebih responsif serta untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan secara adil dan merata.

b. Bagi Pelaku Ekonomi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pelaku ekonomi sehingga dapat melaksanakan kegiatan ekonomi yang lebih baik dan bermanfaat.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan atau sumber referensi bagi peneliti selanjutnya dalam kajian yang sama dengan variabel penelitian yang berbeda.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan suatu batasan yang bertujuan untuk memudahkan pembahasan pada topik permasalahan tertentu dengan memfokuskan pada variabel-variabel dan objek atau lokasi penelitian yang

telah ditentukan.¹⁵ Maka dari itu, ruang lingkup dalam penelitian ini difokuskan pada ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa dengan menggunakan variabel independen (bebas) diantaranya pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS).

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian merupakan suatu keadaan atau kendala yang terjadi dimana tidak dapat dihindari pada proses penelitian sehingga tidak bisa dilakukan secara maksimal. Keterbatasan pada penelitian ini meliputi terbatasnya waktu, biaya, dan tenaga.¹⁶ Selain ketiga hal tersebut masih terdapat beberapa keterbatasan lain, meliputi:

1. Penelitian terdahulu terkait dengan teori mengenai hubungan ZIS dengan ketimpangan pendapatan masih terbatas.
2. Peneliti tidak menemukan data penyaluran Dana ZIS Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2023 di website Baznas provinsi maupun Baznas pusat. Sehingga peneliti mengambil sampel penelitian sejumlah 5 provinsi yaitu Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, D.I Yogyakarta dan Jawa Timur.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Ketimpangan Pendapatan adalah permasalahan yang terjadi karena

¹⁵ Abd. Mukhid, *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), hlm. 60

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 61

perbedaan produktivitas antar individu di suatu negara atau daerah, sehingga mengakibatkan perbedaan pendapatan antara individu dengan produktivitas tinggi dan berpenghasilan tinggi dengan individu dengan produktivitas rendah dan berpenghasilan rendah.¹⁷

- b. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.¹⁸
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah indikator untuk mengukur jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.¹⁹ Pengangguran terbuka adalah kondisi dimana individu tidak memiliki pekerjaan sama sekali dan sedang aktif mencari pekerjaan. Kondisi ini terjadi ketika jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja.²⁰
- d. Penyaluran dana ZIS adalah indikator untuk mengetahui jumlah dana yang tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran dana adalah tindakan atau tindakan atau proses dimana dana dialokasikan, didistribusikan atau disalurkan kepada penerima yang

¹⁷ Nur Asri Ainun., dkk, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 143

¹⁸ Junaiddin Zakaria, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: GP Press, 2009), hlm. 104

¹⁹ Suparman, *Ekonomi Bencana: Prinsip-Prinsip Dasar dan Model Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana*, (Tasikmalaya: EDU Publisher, 2023), hlm. 304

²⁰ I Putu Mertha Astawa., dkk, *Kewirausahaan: Teori, Niat, dan Praktik di Perguruan Tinggi*, (Bali: Intelektual Manifes Media, 2024), hlm. 2

membutuhkan. Penyaluran dana terjadi setelah dana berhasil terkumpul atau diperoleh dari berbagai sumber dan dana tersebut akan dialokasikan sesuai dengan tujuan dan prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya.²¹ Sedangkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) merupakan institusi resmi dalam syari'at Islam yang berhubungan dengan hak milik seseorang atau badan hukum yang bernilai ibadah dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang berguna bagi kesejahteraan umat manusia, memelihara keamanan dan keseimbangan sosial ekonomi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan umat dan masyarakat secara keseluruhan.²²

2. Definisi Operasional

- a. Ketimpangan Pendapatan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Indeks Gini (Gini Ratio) menurut provinsi di Pulau Jawa tahun 2017-2023. Sumber data diperoleh dari *website* Kementerian Dalam Negeri. Ditunjukkan dengan rumus sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n [f p_i (F c_i + F c_{i-1})]$$

Dimana:

GR : Gini Ratio (indeks gini)

$F p_i$: frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

²¹ Rispa Eliza., dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*, (Indramayu: Adab, 2025), hlm. 40

²² Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi*, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2005), hlm. 20

F_{ci} : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{ci-1} : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-(i-1)

- b. Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian ini diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan Harga Konstan menurut provinsi di Pulau Jawa tahun 2017-2023. Sumber data diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS). Ditunjukkan dalam persen dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRBt} - \text{PDRBt-1}}{\text{PDRBt-1}} \times 100\%$$

Dimana:

PDRBt : PDRB periode sekarang

PDRBt₋₁ : PDRB periode sebelumnya

- c. Tingkat Pengangguran Terbuka dalam penelitian ini diukur dari jumlah penduduk yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) dengan jumlah angkatan kerja menurut provinsi di Pulau Jawa tahun 2017-2023. Sumber data diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS).

$$\text{TPT} = \frac{\text{jumlah pengangguran}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

- d. Penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dalam penelitian ini ditentukan dari jumlah pendistribusian dana dari kegiatan keagamaan yaitu Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada beberapa aspek yang membutuhkan baik aspek konsumtif maupun produktif menurut provinsi di Pulau Jawa tahun 2017-2023. Sumber data penyaluran dana

ZIS diperoleh dari *website* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk mempermudah penyajian dari bab per bab yang mana masing-masing bab dibagi ke dalam sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang teori yang membahas variabel pertama, variabel kedua dan seterusnya, menguraikan kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang tentang pendekatan dan jenis pendekatan penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel, skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian serta analisis data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis serta temuan penelitian.

5. BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang uraian pembahasan hasil penelitian dari rumusan masalah.

6. BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang dibuat berdasarkan penelitian dan saran yang diberikan penulis. Serta di bagian akhir juga terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran penelitian dan daftar riwayat hidup.